

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Konsep Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ini pun sejalan dengan konsep Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini membahas tentang penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual.

Kemudian muncullah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang mewajibkan semua organisasi pemerintahan baik yang di pusat maupun di daerah untuk menerapkan PP 71 Tahun 2010 atau Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Setelah melalui proses sosialisasi dan pelatihan Pemerintah dalam hal ini melalui Menteri Dalam Negeri meminta semua organisasi pemerintahan menerapkan akrual sejak tahun 2015. Basis Akrual sendiri adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tapi memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Tentunya ini berbeda dengan basis Kas yang selama ini

diterapkan di organisasi pemerintah, yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sohidin, dkk (2014) dalam paper penelitiannya yang membahas tentang rancangan penyusunan sistem informasi akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Paper ini menjelaskan bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Penelitian yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan *Standard Operational dan Procedure* (SOP) seluruh kegiatan keuangan pada setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD/badan/dinas/kantor) di Pemkab Sukoharjo. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi dan menetapkan kesesuaian antara sistem informasi keuangan daerah Pemkab Sukoharjo yang telah berlaku dengan Peraturan Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dari paper tersebut maka penulis mengambil poin-poin penting tentang bagaimana penerapan akrual di salah satu Pemerintah Daerah, tantangan dan proses apa saja yang dilalui dalam penerapan basis tersebut, sehingga dalam penelitian ini akan dibangun Sistem Informasi Akuntansi berbasis akrual yang dapat membantu Pemerintah Daerah melaksanakan penganggaran yang baik, penatausahaan keuangan yang tertib dan pelaporan keuangan yang akurat dan benar. Penelitian ini melengkapi kekurangan pada paper Sohidin, dkk (2014) yang belum menggunakan Bagan Akun Standar yang terlampir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah :

Bagaimana menyusun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang berbasis akrual untuk menyelenggarakan penganggaran yang baik, penatausahaan keuangan yang tertib dan mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan benar.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang berbasis akrual untuk menyelenggarakan penganggaran yang baik, penatausahaan keuangan yang tertib dan mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan benar.

1.4. Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak terlalu luas dan menjadi lebih mudah dipahami, perlu dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah data *dummy* atau data contoh yang mengambil dari contoh inputan transaksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Lamongan.
2. Data yang digunakan pada proses transaksi meliputi data anggaran, penatausahaan keuangan (penerimaan dan belanja) dan jurnal penyesuaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
3. Sistem informasi yang dibuat menggunakan metode akrual untuk pencatatan jurnal dari setiap transaksi penatausahaan keuangan.
4. *Chart Of Account* (CoA) atau Kode Akun yang digunakan adalah keluaran Bagan Akun Standar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

1.5. Metodologi Penelitian

Metode penyelesaian masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini disusun dalam langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi literatur,
Membaca dan mempelajari Sistem Akuntansi Pemerintah dan Siklus Keuangan Daerah.
2. Pengumpulan dan Analisa data yang mendukung implementasi, mengumpulkan contoh data transaksi anggaran, penatausahaan

(penerimaan dan belanja) dan jurnal penyesuaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

3. Analisa kebutuhan dan perancangan perangkat lunak, untuk menentukan kebutuhan pembangunan perangkat lunak, serta perancangan struktur data dan aktivitas perangkat lunak yang dibangun.
4. Implementasi, yang merupakan langkah penerapan rancangan yang telah dibuat ke dalam perangkat lunak menggunakan pemrograman berbasis web PHP dan menggunakan database MySQL.
5. Pengujian dan analisa hasil, melakukan ujicoba terhadap perangkat lunak yang dibangun untuk mengetahui sejauh mana keakuratan sistem untuk menghasilkan laporan yang baik dan benar.
6. Penyusunan Laporan
Melakukan penyusunan laporan dari penelitian berdasarkan sistematika penulisan.

1.6. Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : DASAR TEORI

Bab ini berisi teori yang mendukung dan mendasari penulisan ini, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan APBD, Persamaan Akuntansi Pemerintah, Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah, Pelaporan Keuangan, *PHP*.

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisi hasil analisis terhadap permasalahan yang ada serta langkah – langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN HASIL PENGUJIAN

Bab ini berisi implelementasi sistem dan hasil pengujian sistem berdasarkan dari hasil analisis dan perancangan sistem, yaitu pembuatan Sistem Informasi Keuangan dan Akuntansi berbasis akrual

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan secara umum dari keseluruhan penelitian dan saran untuk pengembangan selanjutnya.